

# The Effectiveness of The Smart Indonesia Program at The Education Level of Junior High School in Plered District, Purwakarta Regency (Case Study at Junior High School 2 Plered)

Rismawati\*, Lukmanul Hakim, & Rudyk Nababan

Universitas Singaperbangsa Karawang, JL. Ronggo Waluyo, Kec. Telukjambe Timur 41361, Karawang, Indonesia

## Abstract

In a disbursement of funding assistance for the Smart Indonesia Program, it is necessary to evaluate the implementation of the Smart Indonesia Program at Plered 2 Junior High School, so that it can be identified what are the obstacles in implementing the program that have been set so that it can be improved. The research method use is a qualitative research method with a type of research, namely a case study. The researcher uses the effectiveness theory according to Duncan in Richard M. Steers' book namely (i) achieving goals, (ii) integration, and (iii) adaptation. The results of the research in the Implementation of the Smart Indonesia Program at the Junior High School Education Level at Plered 2 Junior High School have been running but not optimal, because they still cannot ensure that students who receive the Smart Indonesia Program are right on target because it takes time for the survey to come to their house. As well as the lack of oversight from the Purwakarta District Education Office regarding the use or disbursement of these funds.

*Keywords:* Effectiveness, Smart Indonesia Program, JHS 2 Plered.

## 1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia, berarti setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan pendidikan karena selalu berkembang dan berguna selama hidupnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut telah diamanatkan dalam pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian amanat tersebut, telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. (Saroni, 2013) dalam bukunya "Pendidikan Untuk Orang Miskin" menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menciptakan kehidupan sebagai upaya mengubah kondisi sulit menjadi kondisi yang mudah untuk dijalani, yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia (Ali, 2017).

\* Corresponding author.

E-mail address: [risma0279@gmail.com](mailto:risma0279@gmail.com)

Sementara pendapat lain menurut Sutyastie Soemitro Remi dan Priyono Tjiptoherijanto (Tjiptoherijanto & Remi, 2002) mengatakan bahwa “kemiskinan adalah kurangnya pendapatan kebutuhan hidup”, secara absolut mengaitkan kebutuhan seperti kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan perlindungan, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera.

Salah satu penanda penerima PIP sebagai sasaran BSM berupa Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pembiayaan pelaksanaan PIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan (APBN-P) dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana bantuan bagi peserta PIP ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu dibebankan kepada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). KIP juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak (Permendikbud, n.d.).

PIP di Kabupaten Purwakarta merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan perluasan akses dan pemerataan memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh warganya tanpa adanya diskriminasi atau kendala karena faktor ekonomi, sosial budaya, gender, transportasi, geografi, atau lainnya. Pelaksanaan PIP diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter. PIP yang dicanangkan pemerintah dalam pelaksanaannya mempunyai 2 konsekuensi. Pada satu sisi, semua anak bangsa wajib bersekolah sampai batas yang ditentukan pemerintah. Sementara pada sisi lainnya, pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan semua biaya dan wajib menyediakan semua fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan PIP. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar terbukti dengan adanya PIP yang dapat menjamin semua hak dan kewajiban anak untuk tetap bersekolah sampai SMA atau SMK atau MA (Syukri, Sitompul, & Banurea, 2020).

Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta telah mengimplementasikan PIP di delapan jenjang pendidikan SMP dengan jumlah peserta didik penerima PIP, sebagaimana yang tertera pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Jumlah Peserta Didik yang Sudah/Belum Mencairkan Bantuan Dana PIP pada Jenjang Pendidikan SMP di Kecamatan Plered Tahun 2017-2019

Nama Sekolah	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Siswa Penerima			Jumlah Siswa Penerima			Jumlah Siswa Penerima		
	PIP	PIP Sudah Cair	PIP Belum Cair	PIP	PIP Sudah Cair	PIP Belum Cair	PIP	PIP Sudah Cair	PIP Belum Cair
SMP BP Al-Mutohar	19	19	-	20	19	1	15	13	2
SMPIT Darussalam	18	18	-	21	18	3	13	13	-
SMP Negeri 1 Plered	390	388	2	397	390	7	359	350	9
SMP Negeri 2 Plered	325	155	170	370	168	202	240	61	179
SMPIT Hidayatul Gozali	18	16	2	20	19	1	14	10	4
SMPN Satu Atap Terpadu 1 Lingsarsari	215	190	25	220	200	20	202	192	10
SMPN Satu Atap Terpadu 2 Pamoyanan	141	140	1	100	98	2	73	68	5
SMPN Satu Atap Terpadu Rawasari	152	145	7	120	118	2	91	85	1
<b>Total</b>	<b>1.278</b>	<b>1.071</b>	<b>207</b>	<b>1.268</b>	<b>940</b>	<b>328</b>	<b>1.007</b>	<b>792</b>	<b>215</b>

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 peserta didik penerima bantuan dana PIP yang sudah mencairkan dananya sebanyak 1.071 orang dan yang belum mencairkan sebanyak 207 orang atau 19%, sedangkan pada tahun 2018 dari sebanyak 1.268 orang siswa penerima bantuan dana PIP hanya sebanyak 940 orang yang

mencairkan dan sebanyak 328 orang belum mencairkan, kemudian pada tahun 2019 dari sebanyak 1.007 orang siswa penerima bantuan dana PIP hanya sebanyak 792 orang yang mencairkan dan sebanyak 215 orang belum mencairkan.

Peserta didik penerima bantuan dana PIP, adapun sasaran penerima BSM/KIP di SMPN 2 Plered pada tahun 2017-2019, berada di kelas 7, 8, dan 9, sebagaimana tabel 1.2 berikut.

**Tabel 2.** Jumlah Peserta Didik Kelas 7, Kelas 8, dan Kelas 9 yang Sudah/Belum Mencairkan Bantuan Dana PIP di SMPN 2 Plered Tahun 2017-2019

Kelas	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Jumlah Siswa Penerima PIP			Jumlah Siswa Penerima PIP			Jumlah Siswa Penerima PIP		
	PIP	PIP Sudah Cair	PIP Belum Cair	PIP	PIP Sudah Cair	PIP Belum Cair	PIP	PIP Sudah Cair	PIP Belum Cair
7	110	50	60	130	63	67	89	28	61
8	107	53	54	120	55	65	62	21	41
9	108	52	56	120	50	70	89	12	77
<b>Total</b>	<b>325</b>	<b>155</b>	<b>170</b>	<b>370</b>	<b>168</b>	<b>202</b>	<b>240</b>	<b>61</b>	<b>179</b>

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id>

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa peserta didik atau siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 penerima bantuan dana PIP pada tahun 2017 kuotanya sebanyak 325 orang, kemudian kuotanya meningkat pada tahun 2018 sebanyak 370 orang, dan pada tahun 2019 kuotanya menurun hanya sebanyak 240 orang. Begitu juga jika dilihat kuota per-kelas pada tahun 2018 ada peningkatan dari kuota tahun 2017, namun pada tahun 2019 kuotanya menurun untuk kelas 7 hanya sebanyak 89 orang, kelas 8 sebanyak 62, dan kelas 9 hanya sebanyak 89 orang.

Secara umum bahwa dari 8 SMP yang peserta didiknya penerima bantuan dana PIP, ada kecenderungan beberapa peserta didiknya belum mencairkan. Seperti di SMP Negeri 2 Plered menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Pada tahun 2017 yang mencairkan dana bantuan hanya sebanyak 155 dari kuota sebanyak 325 atau hanya 47% dan yang belum mencairkan sebanyak 170 orang, demikian juga pada tahun 2018 yang mencairkan dana bantuan hanya sebanyak 168 dari kuota sebanyak 370 atau hanya 45% dan yang belum mencairkan sebanyak 202 orang, kemudian pada tahun 2019 yang mencairkan bantuan dana hanya sebanyak 61 orang dari kuota sebanyak 240 atau hanya 25% dan yang belum mencairkan sebanyak 179 orang atau paling banyak selama 3 tahun masa pemberian bantuan dana PIP.

Akibatnya timbul permasalahan dalam penyaluran atau pencairan bantuan dana PIP antara lain karena (1) bantuan dana PIP tidak diberikan secara utuh kepada penerima; (2) beberapa peserta didik penerima bantuan dana PIP tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga ada peserta didik yang seharusnya menerima karena memenuhi syarat akan tetapi tidak masuk dalam daftar peserta penerima bantuan dana PIP; (3) tidak semua peserta didik penerima bantuan dana PIP sesuai yang ditetapkan, sebanyak Rp750.000,- per-tahun tetapi ada pula yang menerima bantuan dana PIP hanya Rp350.000,- per-semester.

Menurut pengamatan peneliti bahwa implementasi Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar sudah berjalan namun belum optimal, karena masih belum bisa memastikan siswa penerima PIP tepat sasaran dikarenakan membutuhkan waktu untuk memantau atau survey datang ke rumahnya. Serta kurangnya pemantauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terhadap penggunaan atau pencairan bantuan dana PIP dan evaluasi pelaksanaan juga tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian, efektivitas dalam penyaluran dana PIP belum menjadi suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, yang memerlukan suatu kajian sejauhmana efektivitas pelaksanaan program PIP tersebut di Kabupaten Purwakarta.

Menurut Etzioni, 1975 dalam (Steers, 1985) mengemukakan bahwa efektivitas adalah efektivitas adalah tujuan yang mengikuti suatu daur dalam organisasi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Sementara pendapat lain menurut Gibson dalam (Subkhi & Jauhar, 2013) bahwa efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka penilaiannya akan efektif. Selanjutnya Duncan dalam (Steers, 1985) menyatakan bahwa ukuran atau unsur efektivitas yakni (1) pencapaian tujuan; (2) integrasi; dan (3) adaptasi.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul “Efektivitas Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus pada SMPN 2 Plered Kabupaten Purwakarta)”, dengan menggunakan teori

efektivitas menurut Duncan dalam (Steers, 1985) bahwa terdapat 3 (tiga) unsur untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu (i) pencapaian tujuan, (ii) integrasi, dan (iii) adaptasi.

## 2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai Efektivitas Program Indonesia Pintar pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Plered studi kasus pada SMPN 2 Plered. Penelitian ini juga dilengkapi dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan studi dokumentasi.

Menurut (Sugiono, 2017), Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah Reduksi Data (data reduction), Penyajian Data (data display), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Langkah pertama yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, membuat kategori dan pola. Langkah kedua yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah data bersifat jenuh, artinya, apabila telah ada pengulangan informasi maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling. Teknik purposive merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Efektivitas Organisasi yang terdiri dari tiga tahap. Menurut Duncan dalam (Steers, 1985) teori ini mencakup 3 aspek: (1) Pencapaian Tujuan; (2) Integrasi; dan (3) Adaptasi. Kemudian, dari tahapan tersebut peneliti membuat pedoman wawancara untuk informan, lalu hasil wawancara tersebut dijabarkan ke dalam objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda yaitu (i) Kantor Dinas Pendidikan tepatnya di Jalan Surawinata Nomor 30A, Desa Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jabar 41114; (ii) SMPN 2 Plered tepatnya di Jalan Pangkalan Nomor 99, Desa Palinggihan, Kec. Plered, Kab. Purwakarta, Jabar 41162; (iii) Kantor Bank BRI, Jalan Warung Kandang, Desa Sindangsari, Kec. Plered; (iv) Siswa dan Orangtua Penerima Bantuan Dana PIP, di Jalan. Sempur, Kp. Jawa RT 005/003, Desa Cibogohilir, Kec. Plered, Kab. Purwakarta, Jabar 41162; dan (v) Siswa dan Orang Tua Bukan Penerima Bantuan Dana PIP, di lingkungan SMP Negeri 2 Plered dengan rentang waktu penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah suatu upaya keseluruhan untuk mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai sebuah proses. Dalam pencapaian tujuan ini dapat diukur tingkat keberhasilannya dari kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit dari suatu program.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dikatakan bahwa upaya pencapaian tujuan dari dilaksanakannya PIP ini adalah untuk mencegah meningkatnya angka peserta didik yang putus sekolah (*drop out*) karena terkendala biaya. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Pada aspek sasaran, seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Plered, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk seleksi, sebenarnya sih lanjutan dari Sekolah Dasar (SD) nya pernah menerima manfaat PIP dan sudah terintegrasi dengan data Dapodik. Karena program tersebut turun dari pusat, jadi tidak ada seleksi. Dan bisa juga lanjutan dari orangtuanya sebagai penerima manfaat seperti program KKS, PKH, BPNT, BST, dan BPJS PBI. Dari mekanisme penyaluran PIP ini, ada yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan ada juga yang tidak memiliki kartu Indonesia pintar, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Calon penerima bantuan dana PIP disini paling 80% yang menerima bantuan atau bisa dicairkan dana PIP dan 20% nya yang tidak

melanjutkan pendidikan, karena dari 20% ini siswa waktu SD nya pernah mendapatkan bantuan dana PIP, tetapi malah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dikarenakan siswa yang seharusnya melanjutkan ke jenjang SMP, tapi malah memilih kerja bahkan ada yang sudah menikah. Koordinasi pihak sekolah dengan pihak Bank BRI sebagai pihak penyalur ini cukup baik. Walaupun memerlukan waktu yang lama, karena proses pencairan DARI Bank BRI harus menginput datanya dulu, apakah sudah sesuai, lalu apa saja yang kurangnya. Penyebab bantuan dana PIP di SMPN 2 Plered masih ada yang belum dicairkan mungkin karena siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan juga karena ketinggalan informasi atau tidak masuk sekolah pada saat pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP. Sehingga rekening peserta didik yang menerima belum teraktivasi lewat dari batas waktu tersebut akan dikembalikan ke kas Negara.” (wawancara dengan Bapak Cucu Agus Hidayat, S.Pd., M.Pd, 12 September 2022 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan CAH diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan sudah berjalan namun belum optimal, karena tidak adanya pemantauan dari Dinas Pendidikan ketika ada pelaksanaan pencairan dana PIP di lingkungan Sekolah. Dikatakan sudah berjalan, karena PIP sudah memiliki target waktu yang sudah ditentukan. Penerima juga sudah tepat sasaran karena siswa yang menerima PIP sudah memiliki KIP atau juga orangtua siswa adalah penerima manfaat seperti program KKS, PKH, BPNT, BST, dan BPJS PBI. Program Indonesia Pintar ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi, tingkat keberhasilan dari program tersebut tidak mencapai 100% Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala, seperti tertinggalnya informasi, atau tidak masuk sekolah saat ada pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP, serta ada pula siswa yang berhenti sekolah dikarenakan memilih bekerja ataupun menikah.

### 3.2. Integrasi

Adaptasi adalah suatu proses kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beradaptasi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar pada jenjang Pendidikan SMP khususnya SMPN 2 Plered di Kecamatan Plered, apakah ada perubahan yang terjadi atau tidak ketika melaksanakan pencairan dana bantuan tersebut serta apakah bantuan tersebut dapat meringankan orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya atau mengandalkan dana bantuan saja atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, M.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan mengenai aspek adaptasi, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu harus bisa beradaptasi. Kita sebagai manusia pun pasti bakal terus beradaptasi, ya mau gimana pun harus bisa. Dan nggak harus mengandalkan dana bantuan PIP saja, orangtua siswa penerima PIP harus tetap bisa mencari pendapatan sendiri, cari penghasilan, karena kan tadi sudah saya sampaikan dana bantuan PIP ini ya sekedar membantu meringankan biaya sekolah saja. PIP inikan tahapan pelaksanaannya pertahun dapat Rp.750.000 selama 3 kali pencairan. Cuma kalo dibilang membantu, ya biar menjaga siswa penerima PIP atau orangtua siswa penerima PIP seenggaknya tidak kekurangan biaya sekolah. Dinas Pendidikan juga melakukan pendampingan dengan cara mengecek dapodik sekolah untuk pendataan serta memberikan pengarahan hanya kepada Kepala Sekolahnya saja.” (Wawancara dengan Bapak P, 26 Agustus 2022, pukul 12.30 WIB)



**Gambar 1.** Sosialisasi Pelaksanaan Pencairan Dana PIP

Sebagai penerima bantuan, masyarakat/siswa penerima PIP pun merasa bahwa pihak Bank BRI dan pihak Sekolah sudah mensosialisasikan program ini kepada siswa-siswi penerima PIP yang akan diajukan. Hal ini diungkapkan oleh Nisa Amelia selaku siswa penerima PIP, ia mengatakan bahwa:

“Saya sih sudah dikasih tau oleh pihak Bank BRI terkait pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP, Bank BRI yang datang ke Sekolah. Mau ada bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti kalau mau mengajukan dapat bantuan dana ngambil nya di aula sekolah. Cuma masih ada saja siswa yang ketinggalan informasi atau tidak masuk sekolah ketika ada pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP, mungkin karena ada yang sakit, ada yang izin dan juga ada yang tanpa keterangan (bolos). PIP ini buat siswa-siswi yang memiliki KIP dan yang tidak memiliki KIP, tetapi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin). Kalau dapat, ya semoga uangnya digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti beli tas, sepatu, kaos kaki, seragam sekolah dan alat tulis. Pihak Sekolah nggak pelit informasi, apa-apa dikasih tau arahannya dulu. Jadi kita juga harus amanah, karena guru pengurus PIP mendampingi kita bila mengalami kesulitan dalam pencairan dana bantuan PIP di Bank BRI. Kalau soal pemotongan terhadap bantuan dana PIP yang siswa lain terima, untuk saat ini tidak pernah terjadi, mungkin pada tahun sebelumnya pernah terjadi melakukan pemotongan bantuan dana tersebut.” (Wawancara dengan Nisa Amelia, 18 September 2022 pukul 18 September 2022 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan pengamatan di atas mengenai proses integrasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya pihak Bank BRI telah berupaya untuk mensosialisasikan program Indonesia pintar tersebut kepada siswa penerima PIP. Seperti dari siapa bantuan tersebut, untuk siapa saja yang berhak menerima, sampai ke alur pencairan dana bantuan tersebut. Pihak Sekolah Pun mensosialisasikan secara langsung kepada siswa nya terkait alur pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP. Siswa dan orangtua siswa yang mengambil uang tersebut secara mandiri di lokasi pengambilan yang telah ditentukan.

### 3.3. Adaptasi

Adaptasi adalah suatu proses kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beradaptasi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar pada jenjang Pendidikan SMP khususnya SMPN 2 Plered di Kecamatan Plered, apakah ada perubahan yang terjadi atau tidak ketika melaksanakan pencairan dana bantuan tersebut serta apakah bantuan tersebut dapat meringankan orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya atau mengandalkan dana bantuan saja atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, M.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan mengenai aspek adaptasi, mengatakan bahwa:

“Tentu harus bisa beradaptasi. Kita sebagai manusia pun pasti bakal terus beradaptasi, ya mau gimana pun harus bisa. Dan nggak harus mengandalkan dana bantuan PIP saja, orangtua siswa penerima PIP harus tetap bisa mencari pendapatan sendiri, cari penghasilan, karena kan tadi sudah saya sampaikan dana bantuan PIP ini ya sekedar membantu meringankan biaya sekolah saja. PIP inikan tahapan pelaksanaannya pertahun dapat Rp.750.000 selama 3 kali pencairan. Cuma kalo dibilang membantu, ya biar menjaga siswa penerima PIP atau orangtua siswa penerima PIP seenggaknya tidak kekurangan biaya sekolah. Dinas Pendidikan juga melakukan pendampingan dengan cara mengecek dapodik sekolah untuk pendataan serta memberikan pengarahan hanya kepada Kepala Sekolahnya saja.” (Wawancara dengan Bapak P, 26 Agustus 2022, pukul 12.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan P diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang telah disampaikan oleh pihak dinas pendidikan ini mengatakan kita sebagai manusia harus bisa saling beradaptasi, mau bagaimanapun harus bisa. Tidak harus mengandalkan dana bantuan saja, harus bisa cari pendapatan sendiri atau harus bisa cari penghasilan sendiri. Karena PIP yang akan diperolehnya dapat Rp.750.000 per tahun, jadi belum cukup untuk ngasih uang bekal tiap pergi ke sekolah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Asril Musthafa selaku pegawai Bank BRI mengatakan bahwa:

“adaptasinya sih pihak sekolah atau guru pengurus PIP yang akan datang ke Bank nya untuk mengusulkan jumlah dan nama-nama siswa penerima PIP di sekolah tersebut harus segera bisa dicairkan. Ya kadang suka ada yang nanya dari pihak sekolah sebagai pengurus PIP “kapan bisa dicairkan”. Jadi kami tidak bisa menjanjikan hari esok akan bisa di cairkan, karena kami harus mengecek data-datanya dulu, apakah sudah sesuai apa belum. Pihak Sekolah juga melakukan pendampingan terhadap siswa yang mengalami hambatan dalam pencairan bantuan dana PIP, terutama siswa yang tidak bisa berbicara atau keterbatasan fisik.

Kalau soal untuk mengatasi bantuan dana PIP masih ada yang belum dicairkan, ya paling memberikan informasi secara lisan atau tulisan pada sekolahnya, nanti pihak sekolahnya yang akan menyampaikan informasi mengenai pencairan dana PIP harus segera diambil. Jika tidak diambil, maka dana PIP ini akan dikembalikan ke kas Negara. Penyelenggaraan PIP ini perlu dilaksanakan oleh pemerintah pada masa mendatang, karena penyelenggaraan PIP ini dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dan dapat menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok.” (Wawancara dengan Bapak AM, 3 Agustus 2022, pukul 15.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Guru pengurus PIP yang mengusulkan data-data nama dan jumlah siswa-siswa sebagai penerima PIP di SMPN 2 Plered. Akan tetapi pihak Bank BRI tidak bisa menjanjikan hari esok atau secepatnya akan bisa di cairkan, karena pihak Bank BRI harus mengecek data-datanya apakah sudah sesuai apa belum. Proses adaptasi tersebut penting untuk dilakukan oleh target dari Program Indonesia Pintar supaya mengetahui program tersebut sudah ada perubahannya apa belum.

Berdasarkan pengamatan diatas terdapat pada indikator adaptasi bahwa adanya dana bantuan PIP dapat menimbulkan suatu hal yang baru bagi penerima manfaat PIP di SMPN 2 Plered. Dalam mencari calon penerima PIP ini sudah tercover oleh Dapodik atau yang belum tercover oleh Dapodik bisa diusulkan untuk mendapatkan PIP asalkan orangtuanya sebagai penerima manfaat seperti PKH, BST, BPNT, BPJS PBI dan KKS.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta khususnya SMPN 2 Plered, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan PIP pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Plered sudah berjalan namun belum optimal, berdasarkan tiga tahapan efektivitas sebagai berikut.

##### *Pencapaian Tujuan*

Pencapaian tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah bantuan untuk siswa miskin agar mereka tetap kembali bisa bersekolah dengan layak dan tidak kekurangan biaya pendidikannya. Namun pada aspek sasaran masih belum bisa dipastikan tepat sasaran, dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama bilamana satu persatu siswa harus terpantau atau survey datang ke rumahnya langsung. Waktu pelaksanaan PIP tidak ada pengawasan dari Dinas Pendidikan, atau kurangnya pemantauan dari pihak sekolah terkait penerima PIP masih belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.

##### *Integrasi*

Jika ditinjau dari segi integrasi, bahwasannya pihak Bank BRI selaku penyalur bantuan dana telah berupaya untuk mensosialisasikan Program Indonesia Pintar tersebut kepada siswa penerima PIP. Seperti dari siapa bantuan tersebut, untuk siapa saja yang berhak menerima, sampai ke alur pencairan dana bantuan tersebut. Pihak sekolah pun mensosialisasikan secara langsung pada siswa nya terkait alur pelaksanaan pencairan bantuan dana PIP. Karena memang siswa dan orangtua yang mengambil uang tersebut secara mandiri di lokasi pengambilan yang telah ditentukan. Sehingga dalam hal ini sistem integrasi yang dilaksanakan sudah berjalan namun belum optimal, karena masih banyak siswa miskin yang belum mengetahui mekanisme tersebut.

##### *Adaptasi*

Sedangkan ditinjau dari segi adaptasi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa adanya bantuan dana PIP dapat memberikan suatu hal yang baru bagi penerima manfaat PIP di smp Negeri 2 Plered. Dalam mencari calon penerima PIP ini sudah tercover oleh Dapodik bisa diusulkan untuk mendapatkan PIP asalkan orangtuanya sebagai penerima manfaat seperti PKH, BST, BPNT, BPJS PBI, dan KKS.

#### **References**

- Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Permendikbud. (n.d.). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015*

*tentang Program Indonesia Pintar.*

- Saroni, M. (2013). *Pendidikan untuk orang miskin: membuka keran keadilan dalam kesempatan berpendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi (terjemahan)*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Subkhi, A, & Jauhar, M. (2013). *Pengantar Teori dan perilaku organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syukri, M., Sitompul, M., & Banurea, O. K. (2020). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
- Tjiptoherijanto, Prijono, & Remi, S. S. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.